

AKTIVITAS ORGANISASI-ORGANISASI KIRI DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA 1958-1965

DESTEL MERI

STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh

destelmeri05@gmail.com

Abstract: *This research examines the activities carried out by leftist organizations following the 1955 Election until the time of the Gestapu event. These left organizations which are Underbouns of the Indonesian Communist Party began to wander after the 1955 PKI Election. The mass of PKI supporters and leftist mass organizations even grew after the regional upheaval. In West Sumatra the PKI gained the third number of supporters after Masyumi and Perti. From the results of this research can be described that of these Left organizers have programs aimed which are for community, especially who have low or lower economic. The main purpose of these programs is to attract mass as much as possible. There are also programs that are Agrarian Reform Program, marriage bill and women's rights law, the formation communal gardens, sembad and mutual cooperation. Unilateral action, violence, terror and intimidation colored PKI activities and underboun especially, against ex PRRI supporters. after PRRI, most of the Villages in Limapuluh regency were occupied by PKI because they guarded the PRRI*

Keywords: *Activity. Group, Left, Mass*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji aktivitas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kiri pasca Pemilu 1955 sampai pada menjelang peristiwa Gestapu. Organisasi-organisasi kiri ini yang merupakan *Underboun* dari Partai Komunis Indonesia ini mulai mengeliat setelah pada Pemilu 1955 PKI. Jumlah massa pendukung PKI dan organisasi massa kiri bahkan semakin bertambah setelah pergolakan daerah. Di Sumatera Barat PKI memperoleh jumlah pendukung urutan ketiga setelah Masyumi dan Perti. Dari hasil penelitian dapat digambarkan Masing-masing organisasi Kiri Ini memiliki program-program yang ditujukan untuk masyarakat terutama masyarakat yang memiliki ekonomi rendah atau bawah. Tujuan utama dari program-program ini adalah untuk menarik massa sebanyak-banyak. ada pun program-programnya adalah program Reformasi Agraria, RUU perkawinan dan hak-hak perempuan, pembentukan kebun komunal, *sembad* dan gotong royong. Aksi sepihak, kekerasan, teror dan intimidasi mewarnai aktivitas PKI dan *underboun*nya terutama terhadap eks pendukung PRRI. Pasca PRRI hampir sebagian besar nagari-nagari di Kabupaten Limapuluh kota diduduki oleh PKI karena walinagarinya ikut PRRI.

Kata Kunci: Aktivitas. Golongan, Kiri, Massa

A. Pendahuluan

Tahun 1958 terjadi pergolakan daerah di Sumatera Barat yang dilakukan oleh Dewan Banteng yang dikenal dengan PRRI. Pada dasarnya pergolakan daerah tersebut telah menjadi ajang adu politik antara partai-partai Islam dan organisasinya dengan partai kiri serta *Underboun*nya. Pertarungan politik ini sudah di mulai pada pemilu 1955. Pada Pemilu 1955, Fakta yang lebih mencengangkan partai berlogo palu arit itu menempati urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU secara nasional dan urutan ketiga setelah Masyumi dan Perti di Sumatera Barat.

Tingginya raihan suara PKI itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan tokoh Islam, makin meningkatnya agresivitas PKI dan organisasi kiri lain PKI merekrut massa pendukung sebanyak-banyaknya, elit-elit partai membangun kekuatan mereka melalui organisasi massa kiri, seperti Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Adapun organisasi massa kiri yang menjadi titik perhatian penulis adalah BTI, Gerwani, Lekra, di Kabupaten Lima Puluh Kota. Masing-masing dari organisasi massa kiri yang terbentuk melontarkan isu-isu terkait dengan persoalan politik, ekonomi, sosial, gender, pertanian pada era 1950-an.

Barisan Tani Indonesia cabang 50 Kota pada tahun 1950-an melontarkan isu alat produksi tani dan pemanfaatan lahan, seperti mengikutsertakan masyarakat pada acara gotong royong, membagikan peralatan untuk kesawah, seperti cangkul secara gratis, pembuatan Sembat dan kebun kolektif dan pengadaan Mesin Diesel untuk pembangkit tenaga listrik di nagari Taram. Isu berbeda dilontarkan oleh Lekra yang menginginkan dihidupkan kembali kesenian-kesenian tradisional, nasib seniman, termasuk mencegah penetrasi budaya asing dalam masyarakat 50 Kota. Salah satu cara tokoh-tokoh PKI dan organisasi massa kiri untuk menarik simpati dari masyarakat dengan memperkuat dan menyebarkan isu politik, sosial, budaya untuk menghantam lawan-lawan politiknya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Dengan kata lain, metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (*history as past actuality*) menjadi sejarah sebagai kisah (*history as written*). Dalam ruang lingkup Ilmu Sejarah, metode penelitian itu disebut metode sejarah. Metode sejarah digunakan sebagai metode penelitian, pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab enam pertanyaan (5 W dan 1 H) yang merupakan elemen dasar penulisan sejarah, yaitu *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *who* (siapa), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana). Pertanyaan-pertanyaan itu konkretnya adalah: Apa (peristiwa apa) yang terjadi? Kapan terjadinya? Di mana terjadinya? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu

C. Hasil dan Pembahasan

Pasca pendukung PRRI *ijok* ke hutan dan kekosongan di daerah basis PRRI, PKI dan organisasi massa petani terbesarnya (BTI) melancarkan “aksi sepihak” untuk mengambil alih dan menduduki tanah-tanah yang dianggap akan diretribusi kepada petani melalui agenda reformasi agraria (*land reform*). Tanah dan sawah yang diambil adalah sawah dan tanah dari masyarakat yang “*Ijok*” dan langsung diambil alih oleh PKI. PKI mengambil tanah-tanah yang menjadi hak pengulu dengan memanfaatkan Undang-Undang Agraria No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang dikenal dengan UUBH dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Bagi PKI, penghulu adalah setan tuan tanah yang bermukim di desa yang menolak pelaksanaan ketentuan UUPA dan UUBH. Tanah yang boleh digunakan dalam Undang-undang Agraria No.2 tahun 1960 adalah tanah yang biasanya diperlukan untuk penanaman bahan makanan. Akan tetapi, PKI mengambil semua tanah termasuk tanah yang belum diolah penggarap seperti tanah ulayat. Selain itu, dalam Undang-Undang Agraria dijelaskan ketentuan bahwa 60% untuk penggarap tanah, 20% untuk pemilik tanah. dan 20%

untuk pemerintah. Tetapi, PKI merubahnya 40% untuk penggarap tanah dan 60% untuk rakyat (untuk kepentingan PKI)

Keinginan untuk mengubah kehidupan, serta program-program BTI yang memberi solusi membuat BTI dengan mudah mengumpulkan anggota. Sehingga seperti yang digambarkan Jamian "*pado katiko itu bacarabuik urang masuak BTI*" (pada waktu itu orang berbondong-bondong bergabung dengan BTI). Jamian juga mewajibkan masing-masing anggota untuk menanam pohon pisang disekitar pekarangan rumah, mengelola kebun. Hasil dari kegiatan tersebut membuahkan hasil yang melimpah berupa dana kas dan besar, koperasi beras, 5 ekor sapi dan 1 ekor kerbau. Dana kas tersebut digunakan untuk modal bagi masyarakat yang berwirausaha dan dana sosial untuk anggota yang meninggal dunia. Setiap bulannya BTI juga mengadakan pertemuan dengan para anggota untuk membicarakan rencana-rencana kegiatan mereka selanjutnya. Dalam kegiatan tersebut tidak lupa mengundang anggota Gerwani, Lekra dan Pemuda Rakyat.

Pemberantasan Buta Huruf, Undang-undang Perkawinan dan Hak-hak Perempuan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Gerakan Wanita Indonesia. Gerwani masuk ke kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 1956 yang diperkenalkan oleh Sariduana yang merangkap menjadi ketua Gerwani Kabupaten Lima Puluh Kota. Sariduana mengajak kaum perempuan untuk ikut dalam organisasi ini dengan tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan agar tidak tertindas oleh kaum laki-laki. Pada tahun 1950-an sikap keji terhadap perempuan sering ditemui. Di Kabupaten Lima Puluh Kota kasus yang sering ditemui adalah masalah poligami dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan munculnya masalah ini, Gerwani berusaha untuk membantu memecahkan masalah yang dialami oleh perempuan-perempuan yang ada di nagari-nagari. Dengan demikian tidak sedikit perempuan yang tertarik ikut untuk bergabung di dalamnya, mulai dari guru, agamais dan masyarakat biasa. Keanggotaan Gerwani kebanyakan adalah wanita-wanita dari kelas sosial seperti wanita kelas buruh dan petani, wanita kelas atas dan menengah.

Pada masa Gerwani ini dibawah Jamian sebagai badan penyuluhan dan penerangan pada tahun 1960, Ia menyerukan bahwa membentuk kebun-kebun yang ditanam tanaman pokok seperti pisang, sayur-sayuran, umbi-umbian, kunyit, jahe, daun salam dan lainnya. Apabila panen tiba, semua uang yang seharusnya dijadikan sebagai simpanan wajib disimpan sebagai uang kas dan mewajibkan setiap hari anggota harus gotong royong untuk mengerjakan sawah/ladang orang lain kemudian baru mengerjakan sawah masing-masing. Kegiatan lain yang dilakukan oleh anggota Gerwani guna merekatkan kembali bekas luka yang selama ini mereka rasakan pasca PRRI, anggota Gerwani mentradisikan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya."Saling mancibuak ka rumah sasamo". (saling datang kerumah sesama).Gerwani selalu mengadakan pelatihan-pelatihan di rumah-rumah anggota-anggotanya secara bergiliran. Sehingga menimbulkan keakraban antara para anggota. Mereka dengan lebih mudah berbagi di antara para anggota karena kegiatan mereka diadakancara bergiliran. Selain itu, Gerwani mengadakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyiyah selama ini. Bedanya Aisyiyah mengadakan pertemuan di mesjid-mesjid atau surau tetapi Gerwani mengadakan pengajian-pengajian di rumah-rumah anggota.

Musik sebagai bagian dari produksi seni-budaya sebenarnya mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 1950an. Musik hiburan yang berkembang pada waktu itu merupakan bagian dari respon terhadap pengaruh kebudayaan Barat, terutama Amerika

Serikat dan Inggris. Menolak pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Melalui jargon politik sebagai panglima, Lekra menempatkan posisi politik sebagai dasar dari proses berkebudayaan. Politik sebagai panglima merupakan obor agar sebelum melakukan penggarapan seni orang harus mengkajinya dari saluran-saluran politik.

Dalam perkembangan gerakan politik kebudayaannya di Kabupaten Limapuluh Kota Lekra melestarikan beberapa kesenian yang melalui kesenian tersebut Lekra menyampaikan apa-apa saja yang telah dicapai dan hendak mereka capai. Penyampaian kesenian itu antara lain: 1) Seni Musik; 2) Tari; 3) Randai. Pemuda Rakyat merupakan semacam organisasi kepemudaan yang bertujuan menelurkan kader terpelajar yang akan menjadi agen-agen penyebar ideologi langsung ke masyarakat bawah, bahkan mereka adalah masyarakat bawah itu sendiri. Pemuda Rakyat hadir di Kecamatan Harau semenjak awal 60-an, walau sebelumnya Pemuda Rakyat sudah memulai pergerakan di daerah lain di Sumatera Barat, seperti di Padang. Anggota dari Pemuda Rakyat terdiri dari petani miskin, buruh, pelajar, mahasiswa.

Dalam usaha untuk menjalarkan Marxisme ke tengah masyarakat, Pemuda Rakyat Juga melaksanakan Pendidikan ideologi dan politik tingkat daerah/kabupaten dilaksanakan oleh tingkat propinsi yang disebut Sekolah Pemuda Rakyat Daerah Besar (SPDB), para siswanya adalah kader-kader utusan dari tiap-tiap kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Tingkat selanjutnya adalah Kabupaten yang akan mendidik kader ranting yang disebut Sekolah Politik Dasar (SPD).

Usaha Pemuda Rakyat dalam penyebaran Marxisme melalui pendidikan tidaklah mudah, selain bertentangan dengan sistem adat yang sedikit feodal, masyarakat lebih dipusingkan oleh masalah ekonomi ketimbang mengikuti diskusi politik atau mempelajari Marxisme. Masyarakat Kecamatan Harau belum mampu melihat Marxisme sebagai jalan keluar, walau begitu Pemuda Rakyat cukup berhasil, anggota-anggotanya memiliki partisipasi dalam pergerakan organisasi kiri lainnya karena sistem keanggotaan yang merangkap, artinya beberapa anggota PR juga dapat menjadi anggota BTI, Lekra atau Gerwani. Dengan kondisi yang menguntungkan, ketika pasca PRRI aparat pemerintah berada dibawah pengaruh PKI, Pemuda Rakyat terus berkembang. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, Taram dan Simpang Sugiran merupakan basis Pemuda Rakyat yang kuat. Anggota Pemuda Rakyat tidak mencapai ratusan, karena kebanyakan masyarakat lebih tertarik untuk bergabung dengan BTI, namun itu sama saja, karena pada awal 1964 hampir disetiap organisasi kiri lainnya terdapat anggota Pemuda Rakyat, bahkan anggota Pemuda Rakyat tersebut biasanya memegang posisi penting.

Dalam usaha untuk menjalarkan Marxisme ke tengah masyarakat, Pemuda Rakyat Juga melaksanakan Pendidikan ideologi dan politik tingkat daerah/kabupaten dilaksanakan oleh tingkat propinsi yang disebut Sekolah Pemuda Rakyat Daerah Besar (SPDB), para siswanya adalah kader-kader utusan dari tiap-tiap kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Tingkat selanjutnya adalah Kabupaten yang akan mendidik kader ranting yang disebut Sekolah Politik Dasar (SPD). Selama masa PRRI, Sumatera Barat dinyatakan dalam Keadaan Darurat Perang (SOB) dan merupakan daerah Operasi militer. Tokoh-tokoh PKI memanfaatkan Instruksi penyelesaian pemberontakan di Sumatera Barat untuk memperkuat kedudukan politiknya di Sumatera Barat dengan membonceng para perwira militer yang telah dipengaruhi komunis. Organisasi Keamanan Rakyat (OKR) yang direkrut dari anggotan Pemuda Rakyat berubah menjadi Organisasi Pemuda Rakyat merupakan binaan PKI. Dengan Legalitas OPR, maka PKI secara fisik berusaha menyingkirkan lawan-lawan politiknya

dengan melakukan aksi terror, intimidasi dan tindakan brutal terhadap orang-orang PRRI.Organisasi Massa.

Dalam perekrutan anggota OPR ada juga yang berasal dari preman pasar. Perekrutannya juga tidak hanya dilakukan dengan cara terbuka atau bahkan atas kemauan sendiri, tetapi melainkan karena terpaksa, apabila tidak mau menggabungkan diri dengan OPR berarti terlibat PRRI. Sebelum menjadi Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) organisasi ini bernama Organisasi Keamanan Rakyat (OKR) tetapi setelah PRRI terjadi OKR berubah nama menjadi OPR yang langsung berada dibawah komando PKI.

D. Penutup

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwaMeningkatnya jumlah pendukung PKI di Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh usaha PKI dalam menarik simpati masyarakat pasca peristiwa PRRI dengan berbagai cara diantaranya melalui kegiatan dari Organisasi massa kiri seperti Gerwani, Lekra, BTI serta Pemuda Rakyat.Adapunaktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kiri yaitu: 1) Landreform (Perombakan Pemilikan Tanah Pertanian); 2) Pemberantasan Buta Huruf, Undang-undang Perkawinan dan Hak-hak Perempuan; 3) Menghidupkan kembali kebudayaan Tradisional/Daerah; dan 4) Pendidikan Politik dan Ideologi Marxisme terhadap Pemuda.

Daftar Pustaka

- Amrin Imran, dkk. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah "PerangdanRevolusi"*. Jakarta: PT. IchtiarBaruVabHoeve
- AmurwaniDwiLestariningsih. 2011.*GERWANI KisahTapolWanita di Kamp Plantungan*.Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara
- Atmadji Sumarkidjo.1998. *Mendung di Atas Istana Merdeka*.Times Communitons.
- Cribb,Robert.2002. *Pembantain PKI di Jawa dan Bali (1965-1966)*. Yogyakarta: Mata Angsa
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 3, 2017. 606-624.
- KahinAudey. *PerjuanganKemerdekaan Sumatera Barat dalamRevolusiNasional Indonesia 1946-1950*.Padang: MSI Cabang Sumatera Barat
- Mestika Zed.1998. *Sumatera Barat dalam Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta: Sinar Harapan
- Muhammad Rifai, 2006.*Biografi singkat 1925-2006 Pramoedy Ananta Toer*.Jakarta:Garasi
- M. Rusli Karim,1983.*Perjalanan Partai-partai Politik, Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali.
- NasrulAzwar. *SejarahdanPemikiranKomunis*
- Peter Edman,2005 *Komunisme Ala Aidit : Kisah Partai Komunis Indonesia di bawah Kepemimpinan DN Aidit 1950-1965*. Jakarta: Centre Information Analysis
- Rhoma Dwi Arya, Yulianti dan Muhidin M Dahlan, 2008'*Lekra Tak Membakar Buku*' Yogyakarta: Merakesumba.
- Samsuri.2004. *Politik Islam Anti Komunis "PergumulanMasyumidanPKI di Arena Demokrasi Liberal*.Yogyakarta :SafiriaInsania Pres.

Saskia Wieringa. 1998. *KuntulanakWangi:Organisasi perempuan Indonesia Sesudah 1950*. Jakarta :Kalyana mitra Pusat komunikasi dan Informasi Perempuan.